

PERMASALAHAN DALAM PENDAPATAN DAERAH

PAJAK DAERAH

Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. **Opsen Pajak MBLB**

Kab/Kota

1. PBB-P2
2. **PBJT (Hotel, Restoran, Hiburan, Listrik, Parkir)**
3. BPHTB
4. Pajak MBLB
5. Pajak Reklame
6. PAT
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. **Opsen PKB dan Opsen BBNKB**



RETRIBUSI DAERAH

Jasa Umum

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kebersihan
3. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
4. Pelayanan Pasar
5. Pengendalian Lalu Lintas

Jasa Usaha

1. Tempat kegiatan usaha, grosir, perotokan
2. Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
3. Tempat khusus parkir
4. Tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila
5. Rumah potong hewan ternak
6. Jasa Kepelabuhanan
7. Rekreasi, pariwisata, olahraga
8. Penyeberangan orang dan barang di air
9. Penjualan hasil produksi usaha
10. Pemanfaatan (optimalisasi) aset daerah

Perizinan Tertentu

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA)
3. **Pengelolaan Pertambangan Rakyat**

KELEMAHAN PENGENDALIAN PENDAPATAN PAJAK

- Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Tidak Dilengkapi Dengan Lampiran Pendukung
- Terdapat Wajib Pajak yang Perhitungan dan Pembayaran Pajaknya Tetap Setiap Bulan
- Mekanisme Pemeriksaan Bagi Wajib Pajak Daerah yang Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Lebih dari 2 (dua) Bulan Belum Berjalan

Pengendalian atas Proses Penetapan dan Pemungutan Pajak Air Tanah

- Penggunaan Estimasi dalam Penentuan Perkiraan Penggunaan Air Tanah Belum Dilandasi Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Estimasi
- Penerapan Instansi Pemerintah, TNI, POLRI Sebagai Wajib Pajak Tidak Dilaksanakan.
- Data Pendataan WPD Baru yang Bersumber Dari Data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap belum Digunakan

Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan

- Belum Adanya Mekanisme Pengujian atas Pendapatan PPJ serta Rekonsiliasi Penerimaan PPJ Belum Dilakukan Secara Memadai
- Belum Adanya Perjanjian Kerjasama atau Naskah Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

Pengendalian atas Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Terminal

- Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum disetorkan secara netto.
- Karcis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Terminal Tidak Diperforasi.
- Pengendalian Retribusi Terminal lemah.
 - Pencatatan Penerimaan Tidak Tertib
 - Tidak Ada Monitoring Karcis

Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- **Kegiatan Usaha Pertambangan yang Tidak Terdata dalam Data Pemungutan Pajak oleh DPPKA.**
- **Kegiatan Usaha Pertambangan Tidak Berijin.**

Proses Penelitian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

- **Proses Penelitian Lapangan Untuk Pengesahan Tidak Sesuai dengan Batas Waktu yang Ditentukan**
- **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Kurang Bayar Belum Diterbitkan.**



**Badiklat PKN BPK
RI**

Pemeriksaan Terkait Pengelolaan PKB dan BBNKB di Samsat (Terkait Opsen Pajak PKB)

AGENDA

1

- Pendahuluan

2

- Sistem Pengelolaan Di Samsat

3

- Metode Pemeriksaan

4

- Temuan Pemeriksaan

5

- Kendala dalam Pemeriksaan

6

- Diskusi

PENDAHULUAN

Hal-Hal Terkait Samsat

- SAMSAT singkatan dari Sistem Admisitrasi Manunggal di Bawah Satu Atap, yaitu suatu sitem kerjasama secara terpadu anantara Polri, DPKAD dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK/TNK yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas Negara baik melalui PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ serta PNBP Adm. STNK.
- Terdapat Instruksi Bersama tiga Menteri yaitu Menhankam, Mendagri dan Menkeu tentang Prosedur dan Pelaksanaan SAMSAT dalam mengeluarkan STNK, pembayaran PKB, BBN-KB dan SWDKLLJ.

PENDAHULUAN

Pajak Pajak Kendaraan Bermotor

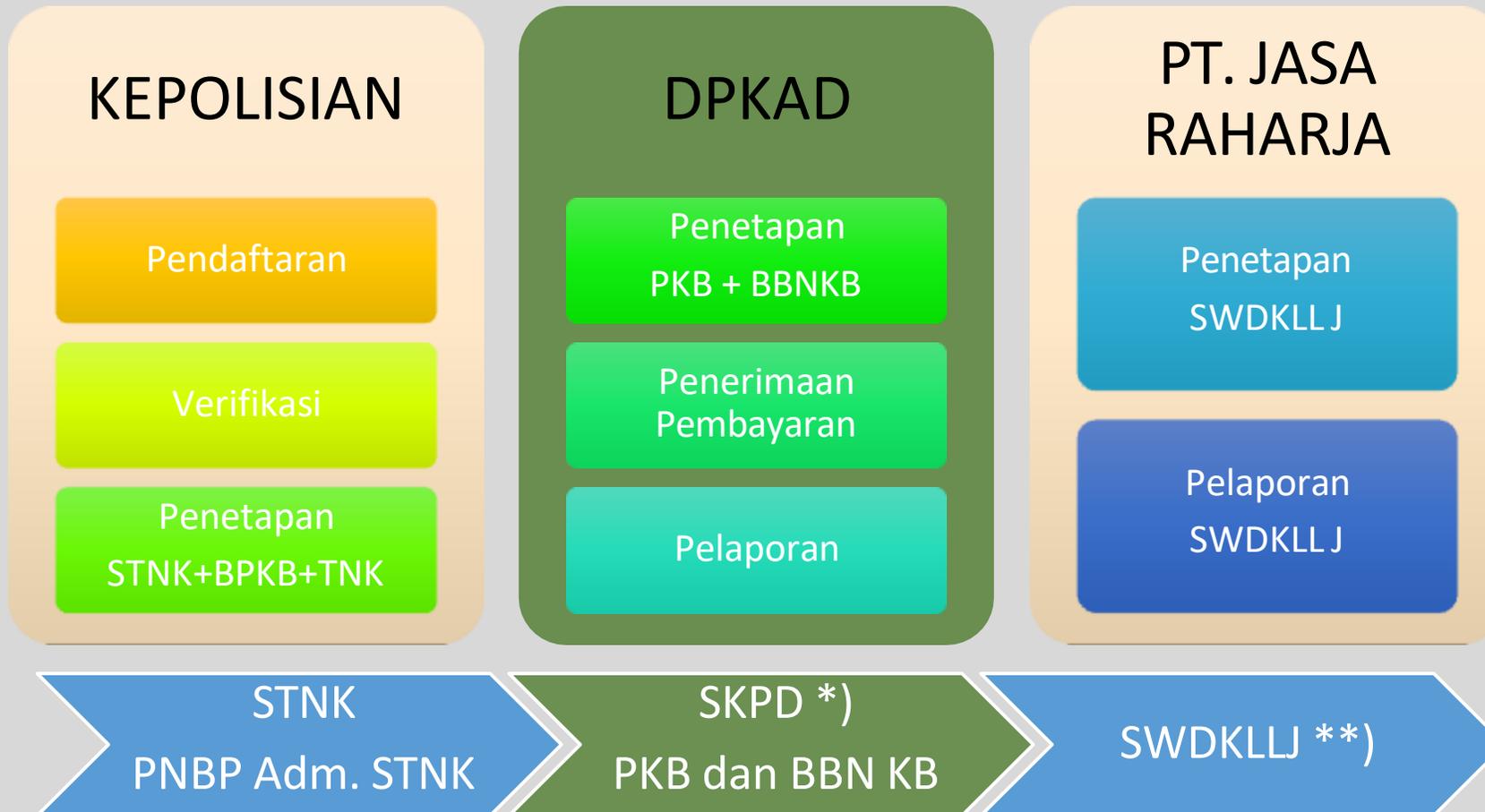
- Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

SAMSAT

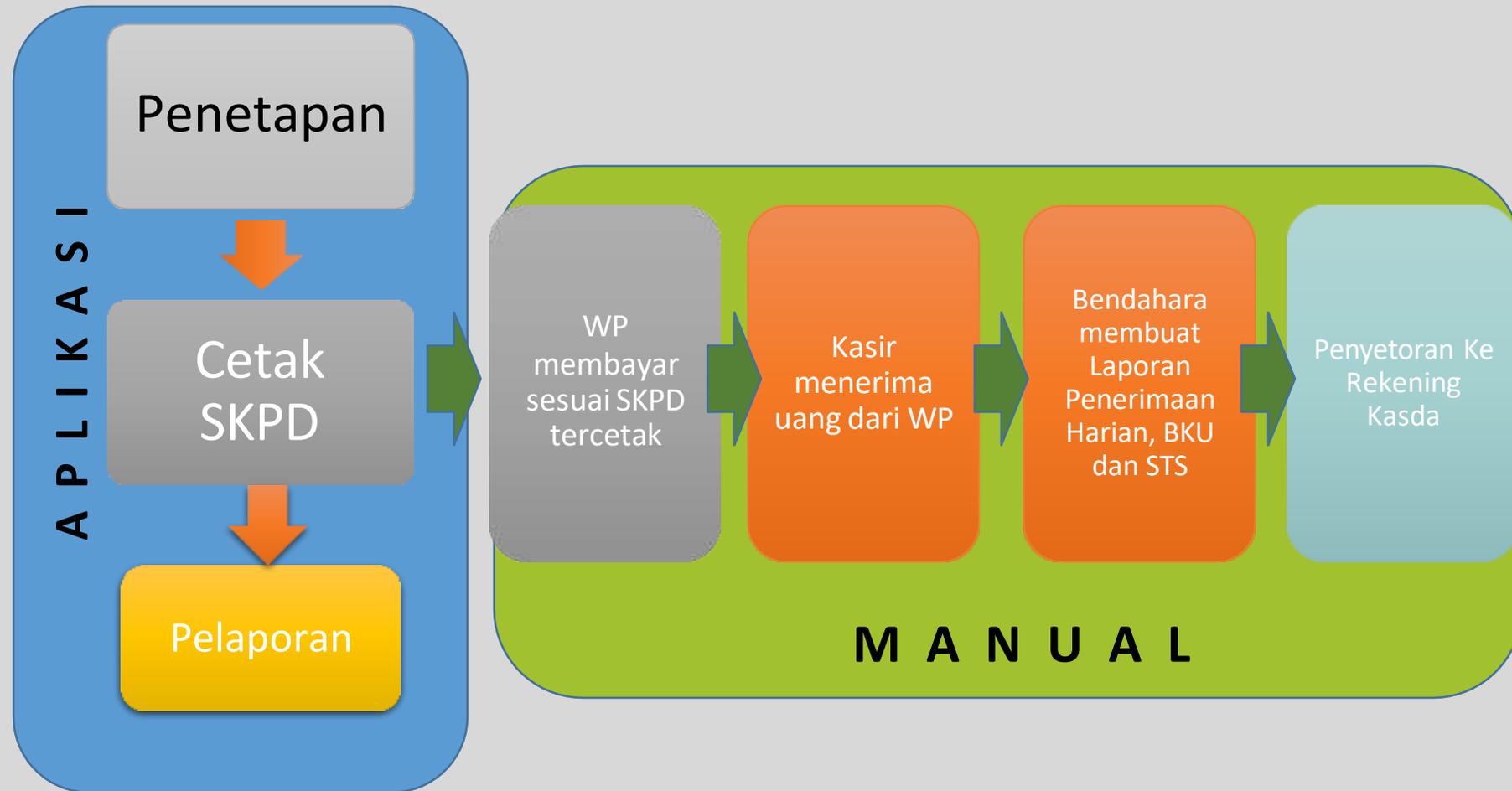
(Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap)



*) Surat Ketetapan Pajak Daerah

***) Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

SISTEM PENGELOLAAN PKB & BBN KB

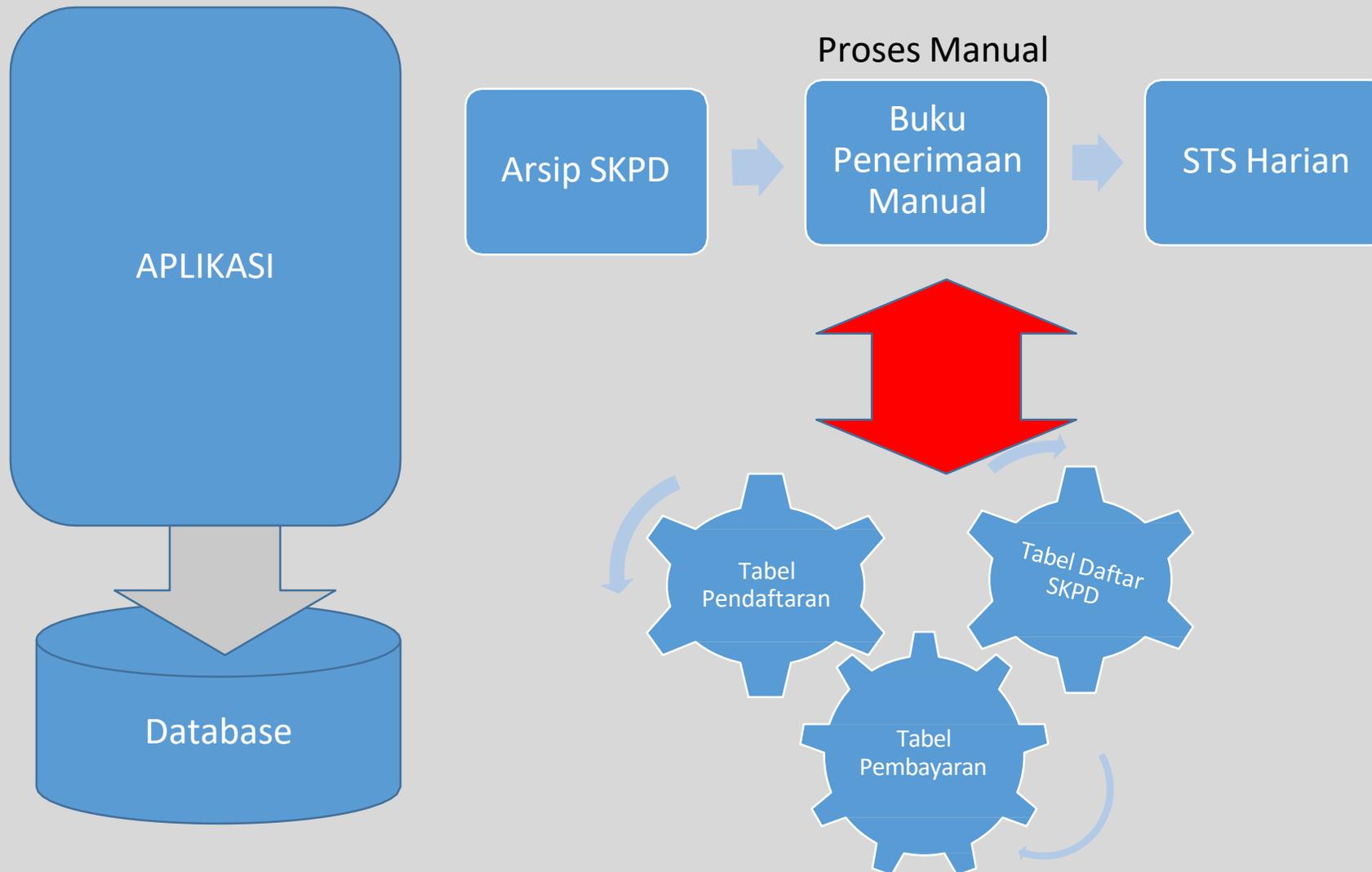


METODOLOGI PEMERIKSAAN

Pelaksanaan Audit TI

Pengujian atas SPI

Pemeriksaan Terinci



PROSES DAN METODE PEMERIKSAAN

Kelemahan Sistem dan Aplikasi Penerimaan PKB dan BBNKB

Perbedaan Nilai Laporan Penerimaan Manual dengan Data SKPD Tercetak

Pencetakan SKPD >1x dengan nilai yang dapat dirubah menjadi lebih kecil

Akibat

Kurang Penerimaan

**INDIKASI AWAL
PERMASALAHAN**

TUJUAN DAN SASARAN

1.

- Memperoleh tingkat keyakinan yang lebih tinggi atas indikasi nilai Temuan Pemeriksaan

2.

- Memastikan pihak-pihak yang terkait sebagai penyebab timbulnya permasalahan (berdasarkan tupoksi dan proses)

3

- Memberikan masukan perbaikan atas kelemahan Sistem Aplikasi

PELAKSANAAN AUDIT TI

Lemahnya Pengendalian Umum (*General Control*)

- Penyimpanan data belum tersentralisasi
- Keterbatasan sumber daya teknologi informasi
- Belum terdapat Daftar Inventaris Barang untuk setiap perangkat *Server* dan komputer *Client*
- Pengendalian keamanan lingkungan ruang *server* kurang memadai
 - Ruang penyimpanan *server* tidak standar
 - Perangkat *server* tidak sesuai fungsinya
 - Perangkat komputer server berfungsi juga sebagai komputer *client* yang memungkinkan *server* digunakan juga untuk menjalankan operasional pelayanan Samsat.

PELAKSANAAN AUDIT TI

Lemahnya Pengendalian Umum (*General Control*)

- Pengendalian keamanan lingkungan fasilitas jaringan komputer belum memadai
- Pengendalian keamanan atas perangkat komputer pada Kantor *Samsat* belum memadai
- Pengendalian internal fungsi pendaftaran dan penetapan belum memadai
- Pengendalian pengamanan secara umum belum optimal
- Pengendalian dan pengelolaan *user* belum memadai

PELAKSANAAN AUDIT TI

Lemahnya Pengendalian Aplikasi (*Application Control*)

- Tidak ada fasilitas untuk menonaktifkan (*disabled*) *user-id* setelah beberapa kali salah memasukkan *password*
- Administrasi password kurang baik
- Tidak ada fasilitas untuk *log-off* atau *lock* secara otomatis
- Fungsi Edit pada aplikasi Sistem Informasi Samsat belum memadai.
- Pengelolaan tabel database belum tertib
- Pelaksanaan prosedur *backup* dan *restore* data belum dilaksanakan secara tertib
- Menu laporan pada aplikasi belum berfungsi secara maksimal

PENGUJIAN ATAS SPI

Lemahnya Pengendalian Intern Pengelolaan PKB dan BBNKB

- Proses penatausahaan secara manual, dimungkinkan adanya penerimaan yang tidak dilaporkan
- Penetapan dan cetak SKPD dapat dilakukan oleh petugas yang tidak berwenang
- Pencetakan SKPD dapat dilakukan di komputer lain yang seharusnya tidak memiliki akses
- Penerimaan pajak dari WP tidak langsung melalui bank, namun melalui Kasir dan Bendahara
- *Cash register* yang dapat disesuaikan

PEMERIKSAAN TERINCI

Ketidakpatuhan atas Sisdur Pengelolaan PKB dan BBNKB

- Tidak seluruh SKPD yang telah dicetak, dicatat dalam buku penerimaan
- Adanya arsip SKPD yang berbeda dengan SKPD asli yang dibayarkan WP
- Pencetakan SKPD secara manual, tidak melalui aplikasi
- Pencatatan dalam buku penerimaan menggunakan arsip SKPD yang tidak sesuai dengan aslinya

PEMERIKSAAN TERINCI

Ketidakpatuhan atas Sisdur Pengelolaan PKB dan BBNKB

- Penyetoran ke Bank dilakukan setelah menyesuaikan riil penerimaan dengan laporan penerimaan yang telah disusun
- Bendahara tidak menyetorkan penerimaan seluruhnya ke Kas Daerah

TEMUAN PEMERIKSAAN

1.

- Pengendalian Umum dan Pengendalian Aplikasi dalam Pengelolaan PKB dan BBNKB Belum Optimal

2.

- Kekurangan Penerimaan PKB dan BBNKB

TEMUAN PEMERIKSAAN #2

Modus- 1

- Cetak SKPD hanya pada asli (lembar 1)
- Cetak ulang SKPD untuk lembar 2 s.d 5 (tembusan) dilakukan **di luar Aplikasi**
- Pengesahan dapat dilaksanakan walaupun hanya pada lembar asli
- Pencatatan buku manual penerimaan menggunakan arsip SKPD
- Perhitungan uang penerimaan harian disesuaikan dengan bukti arsip SKPD
- STS yang dibuat oleh Bendahara tidak sesuai dengan realisasi penerimaan.

Kekurangan Penerimaan

TEMUAN PEMERIKSAAN #2

Pihak Terkait

- Petugas pencetakan SKPD
- Petugas pengesahan / Korektor SKPD
- Petugas pencatat penerimaan pada buku manual
- Bendahara
- Kasir
- Petugas kas register
- Kepala Pelaksana Pungutan (KPP) Samsat

TEMUAN PEMERIKSAAN #2

Bukti

- Bukti Data Elektronik
- Bukti arsip SKPD
- Berita Acara Wawancara dengan petugas
- Bukti penyetoran ke Kas Daerah atas kekurangan penerimaan

TEMUAN PEMERIKSAAN #2

Modus-2

- Cetak SKPD hanya pada lembar yang asli
- Cetak ulang SKPD untuk lembar 2 s.d 5 dilakukan **melalui Aplikasi** yang sebelumnya telah diubah
- Pengesahan dapat dilaksanakan pada lembar asli
- Pencatatan buku manual penerimaan menggunakan arsip SKPD
- Perhitungan uang penerimaan harian disesuaikan dengan bukti arsip SKPD
- STS yang dibuat oleh Bendahara tidak sesuai dengan realisasi penerimaan.

Kekurangan
Penerimaan

TEMUAN PEMERIKSAAN #2

Pihak Terkait

- Petugas pencetakan SKPD
- Petugas pengesahan / Korektor SKPD
- Petugas pencatat penerimaan pada buku manual
- Bendahara
- Kasir
- Petugas kas register
- Kordinator UPC (untuk UPC/*Drivethru*)
- Kepala Pelaksana Pungutan (KPP) Samsat

TEMUAN PEMERIKSAAN #2

Bukti

- Bukti Data Elektronik SKPD yang dicetak lebih dari satu kali
- Bukti SKPD hasil konfirmasi kepada WP
- Bukti arsip SKPD
- Berita Acara Wawancara dengan petugas
- Bukti penyetoran ke Kas Daerah atas kekurangan penerimaan

KENDALA DALAM PEMERIKSAAN

Ketidakjelasan Kepemilikan Data sehingga Kesulitan memperoleh Database

- Perolehan database untuk pengujian awal dari Konsultan
- Kordinasi dengan AKN I
- Kordinasi dengan Polda

Pengolahan Database

- Support dari TI
- Pendekatan TABK

Pengujian data arsip SKPD secara manual

- Keakuratan laporan dan buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan
- Kelengkapan arsip SKPD

Diskusi Kelompok

TUGAS KELOMPOK

- Peserta Diklat dibagi menjadi 5 Kelompok Masing-masing kelompok:
 - Menginventarisasi permasalahan yang terjadi di masing-masing jenis pendapatan asli daerah (masing-masing kelompok membahas jenis pendapatan asli daerah yang berbeda, yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)
 - Mengidentifikasi proses bisnis dimasing-masing jenis pendapatan asli daerah
 - Menganalisis potensi kelemahan SPI di masing-masing pendapatan asli daerah
 - Menyusun langkah-langkah pemeriksaan
 - Mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan sistem diskusi



**Badiklat PKN BPK
RI**

PEMERIKSAAN ATAS PAD

PEMERIKSAAN ATAS SPI

Langkah yang dapat dilakukan minimal:

1. Analisis dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas dan wewenang Dinas/Badan/ Lembaga yang mengelola pendapatan daerah untuk mengetahui apakah telah mencantumkan uraian tugas secara jelas dan telah memisahkan fungsi pendataan dan penetapan, penagihan, pencatatan, dan pelaporan. Selain itu apakah unit pengawasan intern telah dibentuk.
2. Analisis Pelaksanaan organisasi tersebut apakah terdapat perangkapan jabatan dan fungsi.
3. Analisis Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mengetahui:
 - a. Apakah semua Perda penerimaan Pendapatan Daerah telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Apakah semua pendaptan yang dipungut telah ada dasar hukumnya

PEMERIKSAAN ATAS SPI

Langkah yang dapat dilakukan minimal:

4. Analisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Bupati yang berupa Peraturan Bupati, Instruksi ataupun Surat Edaran tentang Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Daerah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Lakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana menghitung potensi obyek pendapatan mekanisme penetapan target pendapatan.
6. Dapatkan data potensi obyek pendapatan daerah, estimasi pendapatan dan data perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk mengetahui apakah target pendapatan telah ditetapkan berdasarkan potensi obyek pendapatan.

PEMERIKSAAN ATAS SPI

Langkah yang dapat dilakukan minimal:

7. Dapatkan dan pelajari sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan Daerah. Teliti, apakah formulir, buku, kartu dan register yang diselenggarakan telah lengkap sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan Pendapatan Daerah yang ditetapkan dan dapat diandalkan sebagai alat pengendalian yang efektif.
8. Lakukan wawancara dengan bendahara penerimaan SKPD dan instansi pengelola Pendapatan Daerah untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan prosedur administrasi untuk setiap jenis penerimaan daerah.
9. Pelajari sistem pencatatan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah. Teliti, apakah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah terjamin validitasnya dan dapat diandalkan.

PEMERIKSAAN ATAS SPI

Langkah yang dapat dilakukan minimal:

10. Teliti apakah transaksi pendapatan asli daerah yang terjadi telah diotorisasi secara tepat, didukung bukti-bukti yang sah dan dibukukan secara tepat waktu.
11. Teliti apakah dokumen pembukuan dan dokumen pengelolaan pendapatan telah disimpan secara tertib dan terjamin keamanannya serta mudah ditemukan setiap saat diperlukan.
12. Teliti, apakah personil yang ditempatkan pada unit kerja/bagian yang menangani tugas pokok pendataan dan penetapan, penagihan, pencatatan, dan pelaporan telah memadai, baik dari segi jumlah maupun tingkat keterampilan dan kecakapannya.
13. Lakukan observasi dengan *walk through* secara uji petik terhadap obyek pendapatan untuk mengetahui apakah apakah terjadi perubahan dengan pelaksanaan sebelumnya dan apakah pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi telah sesuai dengan sisdur yang ditetapkan

PEMERIKSAAN ATAS SPI

Langkah yang dapat dilakukan minimal:

14. Teliti urutan nomor bukti pendapatan daerah apakah penomoran bukti pendapatan daerah dilakukan *by system* atau manual. Apabila penomoran seri atas bukti tersebut tidak dilakukan, teliti pengendalian yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa setiap transaksi pendapatan telah dicatat, dan disetorkan ke kas daerah.
15. Teliti apakah dilakukan rekonsiliasi antara buku penerimaan unit penghasil dengan rekening koran kas daerah/buku besar penerimaan bagian pendapatan SKPKD, serta rekonsiliasi dana perimbangan antara pemerintah daerah dengan KPPN.
16. Teliti dokumentasi yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan (STS dan nota kredit) apakah telah memenuhi pengendalian yang memadai antara lain berupa: (1) Ada seri penomoran (*prenumbered*); (2) Validasi penyetoran ke kas daerah oleh bank persepsi; (3) Kejelasan penyetoran yang meliputi tanggal, nilai, jenis penerimaan, tempat penyetoran (tunai atau bank) dan penyetor.

LANGKAH SUBSTANTIF

Langkah yang dapat dilakukan minimal untuk menguji:

1. Penyajian Informasi Keuangan.
2. Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan PAD (Pajak&Retribusi Daerah).
 - a. *Kegiatan pendataan dan Pendaftaran Pajak dan Retribusi Daerah*
 - b. *Penetapan Pajak Daerah*
 - 1) *Pajak Official Assessment*
 - 2) *Pajak Self Assessment*
 - c. *Penagihan dan Keberatan*
 - d. *Penetapan Retribusi Daerah.*
 - e. *Pemungutan dan Penagihan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah*
 - f. *Pemeriksaan atas kegiatan Pengelolaan Benda Berharga*

LANGKAH SUBSTANTIF

Langkah yang dapat dilakukan minimal untuk menguji:

2. **Kepatuhan terhadap perundang-undangan yang terkait dengan PAD (Pajak&Retribusi Daerah).**
 - g. Penetapan Retribusi Daerah*
 - h. Pemungutan dan Penagihan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah*
 - i. Penagihan dan Keberatan*
 - j. Kegiatan Pengelolaan Benda Berharga.*
3. **Atas Lain-lain PAD Yang Sah**
4. **Atas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**
5. **Atas Pendapatan DAU dan DAK**
6. **Atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**
7. **Atas Lain-lain Pendapatan yang Sah**

LANGKAH SUBSTANTIF

Rincian Langkah dan Prosedur Pemeriksaan atas
Pendapatan Daerah tersebut adalah:

Langkah Substantif-Pendapatan Daerah.doc

Penulis :

Dr. Erwin Antoni., SE., Ak., ST., MT., M.Si., CA

TERIMA KASIH